

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Turki dalam penarikan diri dari Konvensi Istanbul pada Maret 2021 menggunakan kerangka teoritis Joakim Eidenfalk yang membedakan sumber perubahan kebijakan luar negeri ke dalam faktor domestik dan internasional. Pada tingkat domestik, birokrasi Turki bertransformasi dari institusi lembam menjadi instrumen fasilitator aktif setelah sentralisasi kekuasaan eksekutif pasca transisi ke sistem presidensial 2018, tercermin dari pembubaran Kementerian Urusan Perempuan serta peran Diyanet dan TIHEK dalam melegitimasi narasi anti-gender. Opini publik menunjukkan paradoks signifikan mayoritas masyarakat menolak penarikan diri, namun tekanan kelompok minoritas konservatif yang terkonsolidasi justru lebih menentukan arah kebijakan. Media massa pro-pemerintah seperti Yeni Akit dan TRT berperan sebagai variabel ofensif yang merekayasa kepanikan moral melalui sekuritisasi isu gender, sementara kelompok kepentingan konservatif memiliki akses struktural jauh lebih besar terhadap pusat kekuasaan dibandingkan koalisi pro-Konvensi seperti EŞİK dan KCDP. Dinamika kepartaian memperlihatkan bagaimana tekanan elektoral dari partai kanan seperti YRP mendorong Erdoğan memanfaatkan penarikan diri sebagai *window of opportunity* menjelang Pemilu 2023.

Pada tingkat internasional, pergeseran norma global berupa democratic backsliding, penguatan populisme sayap kanan, serta konsolidasi gerakan anti-gender transnasional menciptakan variabel permisif yang mereduksi otoritas moral

Tatanan Internasional Liberal, diperkuat oleh pandemi COVID-19 yang mengalihkan pengawasan internasional. Pada tingkat regional, kemunduran hubungan Turki dengan Dewan Eropa berjalan beriringan dengan ambisi Neo Ottomanisme Turki di Timur Tengah pasca Arab Spring, di mana penarikan diri dari Konvensi difungsikan sebagai instrumen soft power untuk memproyeksikan citra pembela nilai Islam. Secara bilateral, pembalikan leverage migrasi dalam hubungan Turki-Uni Eropa pasca 2016 serta penguatan aliansi strategis dengan Qatar mengurangi cost politik dan ekonomi yang harus ditanggung Ankara. Adapun aktor non-negara memperlihatkan pertarungan legitimasi normatif antara tekanan evaluatif GREVIO dan jaringan HAM internasional melawan legitimasi ideologis dari koalisi anti-gender transnasional.

Interaksi antara kedua tingkat analisis tersebut memperlihatkan bahwa faktor domestik dan internasional saling memperkuat, bukan bekerja secara terpisah. Melemahnya tekanan normatif Uni Eropa dan Dewan Eropa memberi ruang bagi konsolidasi kekuatan konservatif domestik untuk mendominasi arena kebijakan tanpa risiko sanksi eksternal yang berarti, sementara legitimasi ideologis dari jejaring anti-gender transnasional memperkuat narasi kedaulatan nasional yang telah dibangun oleh birokrasi, media, dan partai politik di dalam negeri. Presiden Erdoğan, sebagai *key decision-maker* dalam kerangka Eidenfalk, memanfaatkan konvergensi kedua sumber perubahan tersebut sebagai *window of opportunity* yang matang pada Maret 2021, ketika kalkulasi politik menunjukkan bahwa keuntungan elektoral domestik jauh melampaui risiko diplomatik internasional. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa penarikan diri Turki dari Konvensi

Istanbul bukan hasil satu faktor tunggal, melainkan interaksi kumulatif antara agensi politik domestik yang oportunistik dengan struktur peluang internasional yang permisif, konsisten dengan model multifaktorial Eidenfalk mengenai sumber perubahan kebijakan luar negeri.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan baik dari sisi akademik maupun praktis. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis dengan pendekatan komparatif terhadap negara-negara lain yang menunjukkan gejala serupa dalam menarik diri atau menolak ratifikasi instrumen HAM berbasis gender, seperti Polandia dan Bulgaria, guna menguji konsistensi model Eidenfalk pada konteks kawasan yang berbeda. Kedua, penelitian lanjutan dapat memperkaya kerangka Eidenfalk dengan pendekatan *gender and International relations* atau *feminist foreign policy analysis* untuk menangkap dimensi kekuasaan patriarkal secara lebih mendalam, mengingat kasus ini sarat dengan dinamika maskulinitas politik yang belum sepenuhnya tercakup dalam model sumber perubahan yang bersifat struktural-institusional.

Ketiga, dari sisi metodologis, penelitian mendatang disarankan menggunakan wawancara mendalam dengan aktor kunci seperti perwakilan KADEM, EŞİK, atau pejabat Kementerian Luar Negeri Turki untuk memperkuat validitas data primer, mengingat penelitian ini masih mengandalkan data sekunder dan analisis dokumen. Keempat, bagi pemerintah Turki, disarankan agar kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan tetap mempertimbangkan data empiris mengenai tingginya angka kekerasan berbasis gender sebagaimana

didokumentasikan KCDP, Daripada mengakomodasi tekanan elektoral kelompok konservatif, agar kebijakan publik tetap berpijak pada prinsip perlindungan hak asasi manusia yang inklusif.

Kelima, bagi masyarakat sipil dan organisasi perempuan Turki, koalisi lintas kelompok seperti EŞİK dan Mor Çatı disarankan untuk terus memperkuat strategi advokasi berbasis data serta memperluas jejaring internasional guna mengimbangi keunggulan struktural kelompok konservatif dalam mengakses pusat kekuasaan. Keenam, bagi komunitas internasional dan Dewan Eropa, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme tekanan normatif seperti GREVIO, mengingat kasus Turki menunjukkan bahwa tekanan evaluatif semata rentan diframing ulang sebagai intervensi asing oleh elite domestik yang oportunistik. Terakhir, mahasiswa dan peneliti hubungan internasional di Indonesia disarankan untuk menjadikan kasus ini sebagai rujukan komparatif dalam mengkaji dinamika kemunduran demokrasi dan politisasi gender di negara-negara dengan basis pemilih konservatif yang kuat.